

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Storey (2010) mengungkapkan bahwa pengembangan wilayah merupakan suatu proses yang tertuju pada penciptaan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Setiap daerah mempunyai potensi yang beragam maka pengembangannya harus disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Secara umum teori pengembangan wilayah menekankan pada kemakmuran daerah, fokus pada sumber daya lingkungan dan faktor alam yang mempunyai dampak besar terhadap keberlanjutan sistem kegiatan produksi, dan fokus kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal disitu lokasi.

Pengertian perbatasan seringkali merujuk pada batas wilayah suatu teritorial politik maupun area tempat tinggal. Dalam beberapa situasi, perbatasan memiliki makna yang luas, mencakup aspek politik dan ekonomi geografis, terutama dalam konteks pembagian kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005). Menurut setiawan et.al (2006), wilayah perbatasan digambarkan sebagai kawasan yang mengalami ketertinggalan. Kondisi ini terlihat dari berbagai aspek, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tantangan lain yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan potensi wilayahnya. Maka pembangunan kawasan perbatasan menjadi isu yang sangat penting untuk diselesaikan secara menyeluruh, melibatkan peran pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sekitar serta dukungan dari berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan terlaksana dengan baik.

Studi Pengembangan Pariwisata Daerah Perbatasan di China membahas model pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan. Penelitian ini membahas pendekatan strategis untuk memanfaatkan potensi pariwisata di daerah perbatasan, termasuk distribusi spasial, pengelolaan sumber daya pariwisata, serta tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi dalam pengembangan kawasan tersebut. Terdapat penelitian yang membahas PLBN Sota di Kabupaten Merauke yang merupakan contoh nyata dari pengembangan ekonomi wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan Sota memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi strategis, karena didukung oleh lokasi geografis yang strategis, akses langsung ke pasar negara tetangga, dan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun pengembangan wilayah ini menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya infrastruktur, teknologi terbatas dan kurangnya sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan

disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi melalui integrasi ekonomi, investasi, dan kerjasama lintas batas. Kebijakan yang tepat dan dukungan dari pemerintah pusat dapat mempercepat proses pengembangan dan mengatasi hambatan yang ada.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berbatasan dengan Timor Leste sepanjang 268,8 km di daratan dan memiliki perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, wilayah ini terdiri dari 12 kabupaten, tiga kabupaten berbatasan langsung di darat (Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara) dan sembilan kabupaten berbatasan di laut. Perbatasan darat terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor timur sepanjang 149,1 km dan sektor barat sepanjang 130,1 km. Kabupaten Belu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dengan total panjang 126 km, dan memiliki 2 pintu gerbang resmi RI-RDTL, yaitu Motaain dan Turiskain. Sebagai pintu gerbang yang memiliki aktivitas lintas batas yang tinggi, baik pergerakan penduduk maupun barang antarnegara.

Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan sebagai salah satu dari 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. PKSN adalah kawasan perkotaan perbatasan yang ditetapkan untuk memperkuat fungsi sebagai pos pemeriksaan lintas batas (*gateway*), simpul transportasi utama, dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. Penetapan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2023, yang menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada PKSN Atambua. Perpres ini mengamanatkan pengelolaan ruang yang menjamin fungsi pertahanan dan keamanan, menjaga keberlanjutan ekologis, serta mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Sebagai PKSN, Atambua mendapat prioritas pembangunan, termasuk dukungan infrastruktur dan program strategis dari pemerintah pusat. Peran ini menjadi pendukung vital bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, volume ekspor barang ke Timor Leste secara konsisten meningkat setiap tahun, yang memperkuat peran ekonomi perbatasan dalam mendorong pertumbuhan regional. Menurut Juasnaedi (2017) pemerintah berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi agar berjalan lancar dan memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan regulasi yang mendukung agar potensi ini dapat berkembang lebih pesat. Dengan dukungan regulasi dan perencanaan terarah, sumber daya strategis, serta peluang investasi yang kuat, Atambua diharapkan tidak hanya memperkokoh posisi sebagai gerbang lintas batas, tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pergerakan barang dari Atambua ke Timor Leste?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kegiatan perdagangan lintas batas di Kota Atambua?
3. Apa saja potensi ekonomi yang dimiliki Kota Atambua sebagai PKSN dan bagaimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana cara mengoptimalkan peran Kota Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan?

## 1.3 Sasaran Penelitian

1. Mengidentifikasi tingkat pergerakan barang dari Atambua ke Timor Leste
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kegiatan perdagangan lintas batas di Kota Atambua
3. Mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki Kota Atambua sebagai PKSN pertumbuhan ekonomi
4. Mengoptimalkan peran Kota Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan peran Kota Atambua sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

## 1.5 Ruang Lingkup Studi

Untuk memudahkan pemahaman dan penjabaran dalam mendukung penelitian ini, ruang lingkup dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Kedua ruang lingkup ini dijelaskan berdasarkan batasan-batasan yang juga berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian ini.

### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kota Atambua merupakan ibu kota Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi salah satu kawasan strategis nasional yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Secara geografis, Atambua berada di bagian timur Pulau Timor, dan memiliki peran vital sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, serta gerbang utama arus lalu lintas orang dan barang antarnegara di kawasan perbatasan. Kota ini memiliki peranan penting dalam lalu lintas perdagangan lintas negara serta menjadi penghubung utama dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi antarwilayah. Wilayah Kota Atambua berada pada ketinggian 400–500 meter di atas permukaan laut dengan kondisi wilayah berbukit dan beriklim tropis kering.

Luas wilayah Kota Atambua mencapai 24,8 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 4 kelurahan yaitu yaitu Fatubenao, Atambua, Manumutin dan Tenukiik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, 2024).

**Tabel 1. 1 Luas Kelurahan di Kecamatan Atambua**

Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Presentase luas terhadap luas kecamatan
Fatubenao	10,55	42,54
Atambua	1,40	5,65
Manumutin	11,35	45,77
Tenukiik	1,50	6,05
<b>Total</b>	<b>24,8</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Kecamatan Atambua Dalam Angka 2024*

Pada grafik di atas diketahui bahwa Kelurahan Manumutin memiliki jumlah penduduk paling banyak sehingga luas kelurahannya paling besar dengan total 45,77% dari total luas wilayah di Kecamatan Atambua, dan untuk kelurahan yang paling kecil yaitu Atambua dengan total luas 5,65% dari total luas wilayah di Kecamatan Atambua.

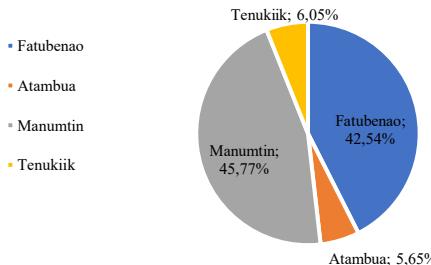
Jumlah penduduk di Kota Atambua tercatat sebanyak 30.071 jiwa pada tahun 2024, berikut merupakan jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Kota Atambua.

**Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Atambua 2024**

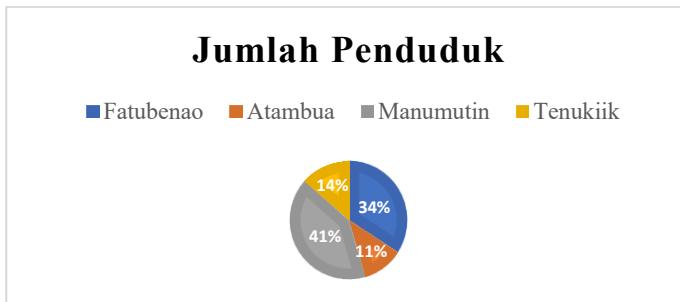
Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Fatubenao	10.276
Atambua	3.412
Manumutin	12.352
Tenukiik	4.031
<b>Total</b>	<b>30.071</b>

*Sumber : Kecamatan Atambua Dalam Angka 2024*

**Pembagian Wilayah Kecamatan Atambua Berdasarkan Luas Kelurahan**



**Grafik 1. 1 Pembagian Wilayah Kecamatan Atambua Berdasarkan Luas Kelurahan**



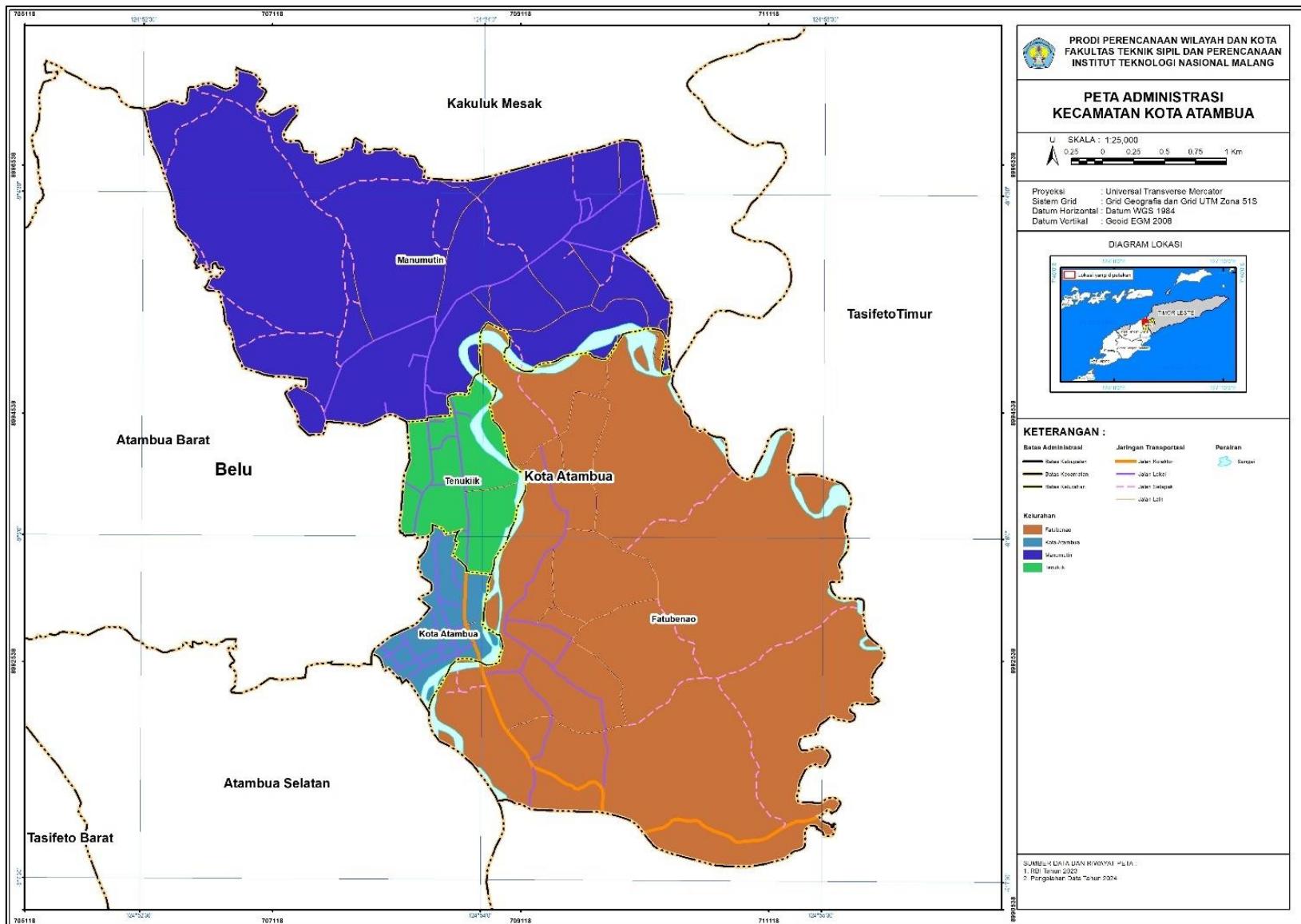
**Grafik 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Atambua**

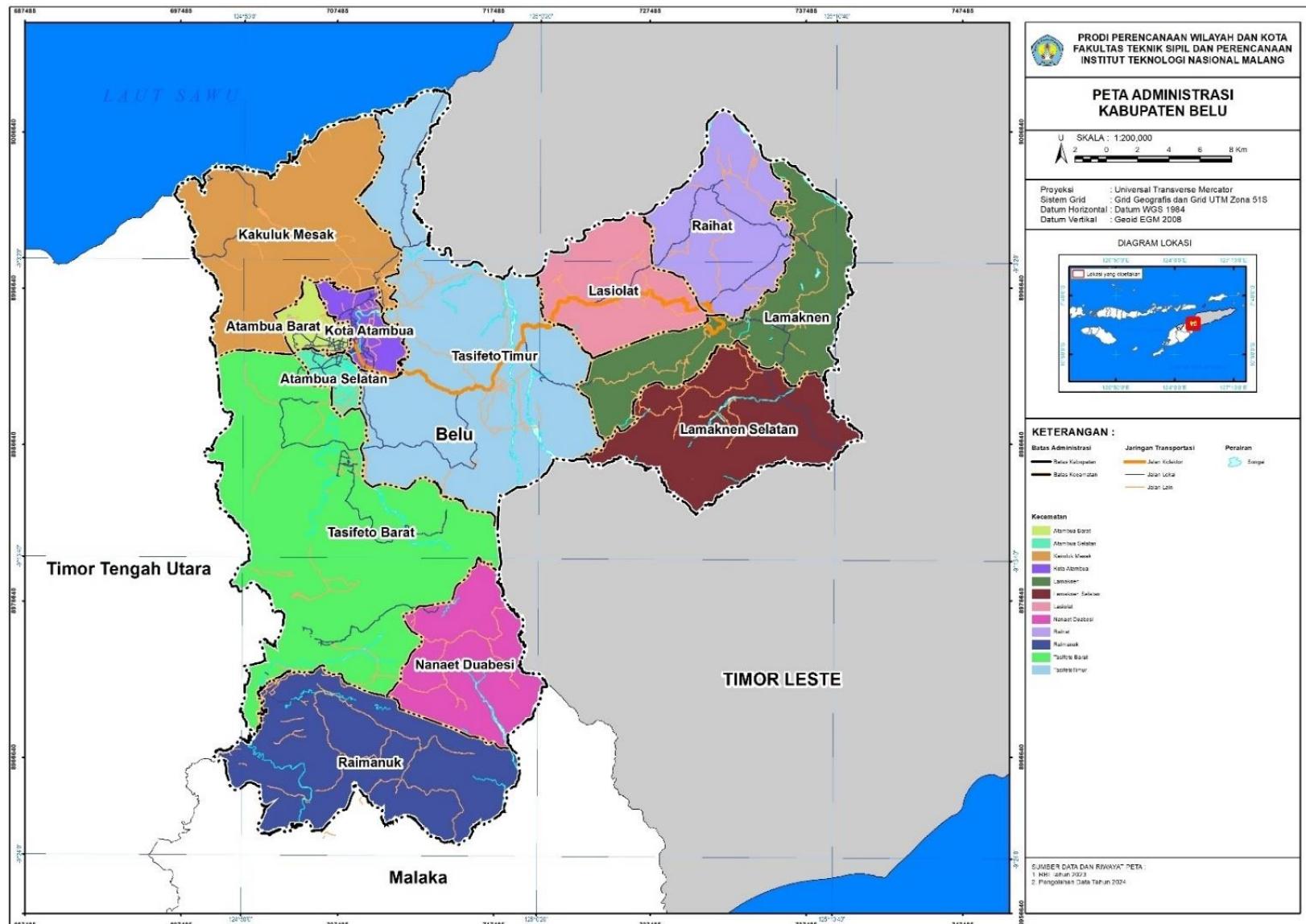
Berdasarkan data pada diagram lingkaran, diketahui proporsi jumlah penduduk dari empat kelurahan yang berada di wilayah pengamatan, yaitu Fatubenao, Atambua, Manumutin, dan Tenukiik. Persentase sebaran penduduk ditunjukkan bahwa Manumutin memiliki proporsi penduduk terbesar, yaitu sebesar 41% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Manumutin merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya, Fatubenao menempati urutan kedua dengan proporsi sebesar 34%, juga menunjukkan jumlah penduduk yang cukup besar dan signifikan terhadap total keseluruhan, Tenukiik menyumbang sebesar 14% dari total penduduk. Meskipun tidak sebesar dua wilayah sebelumnya, wilayah ini tetap memberikan kontribusi sedang terhadap jumlah penduduk keseluruhan, dan Atambua memiliki proporsi penduduk paling kecil, yaitu 11%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Atambua merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara keempat wilayah.

Secara administratif, Kota Atambua dikelilingi oleh beberapa kecamatan yang turut berkontribusi terhadap dinamika wilayah secara keseluruhan. Pengetahuan mengenai batas-batas ini tidak hanya menggambarkan kondisi spasial Kota Atambua, tetapi juga menjadi dasar dalam menganalisis potensi hubungan antarwilayah, distribusi penduduk, serta pelayanan publik lintas kawasan.

Sebelah Utara	:	Kecamatan Tasifeto Timur
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Atambua Selatan
Sebelah Barat	:	Kecamatan Atambua Barat
Sebelah Timur	:	Kecamatan Tasifeto Timur

Dengan memahami batas-batas tersebut, dapat dilakukan identifikasi wilayah yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan Kota Atambua, baik dari segi mobilitas penduduk, pergerakan barang, hingga potensi kerja sama antarwilayah.





Peta 1. 2 Administrasi Kabupaten Belu

### **1.5.2 Ruang Lingkup Materi**

Dalam ruang lingkup materi ini terkait dengan topik studi yang akan dilakukan. Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Distrubusi Barang
4. Wilayah perbatasan
5. Perdagangan Lintas Batas

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, sasaran penelitian, dan ruang lingkup studi yang meliputi aspek wilayah serta materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori, konsep-konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung topik penelitian. Teori-teori yang dibahas digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis data dan fenomena yang diamati. Pemilihan teori disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan, baik dari segi pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, hingga sumber data yang digunakan. Penjelasan metodologi disusun untuk menunjukkan validitas dan keandalan proses penelitian yang dilakukan.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Bab ini menyajikan informasi umum mengenai lokasi penelitian, termasuk kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, serta potensi dan permasalahan yang ada. Selain itu, hasil observasi lapangan dijabarkan secara rinci untuk memberikan pemahaman konteks empiris yang lebih kuat terhadap objek penelitian.

#### **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana hasil analisis data disajikan dan dibahas secara mendalam. Setiap temuan dikaitkan dengan teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Pembahasan dilakukan secara kritis dan sistematis guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

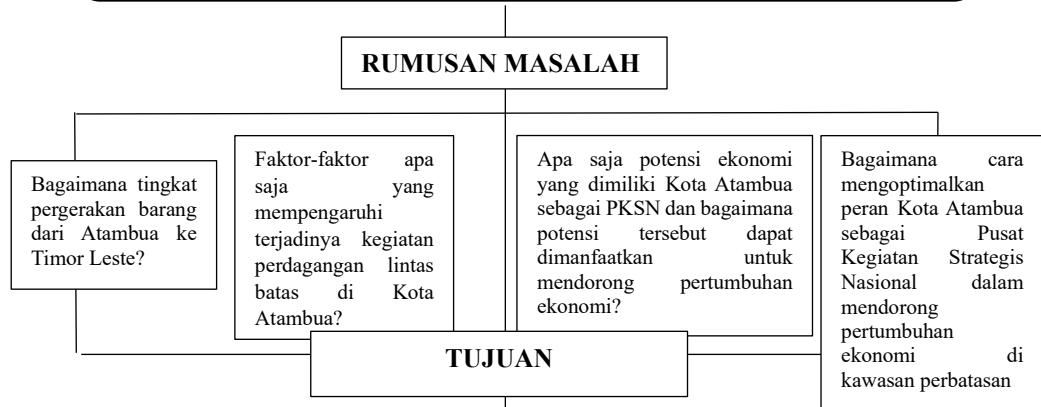
#### **BAB VI PENUTUP**

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan temuan di lapangan. Saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau penelitian lanjutan.

## LATAR BELAKANG

Pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kota Atambua telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kota Atambua memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang perdagangan lintas batas karena aktivitas perdagangan ini cukup tinggi di Kota Atambua

## RUMUSAN MASALAH



Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan peran Kota Atambua sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

## SASARAN

